

BAB 1

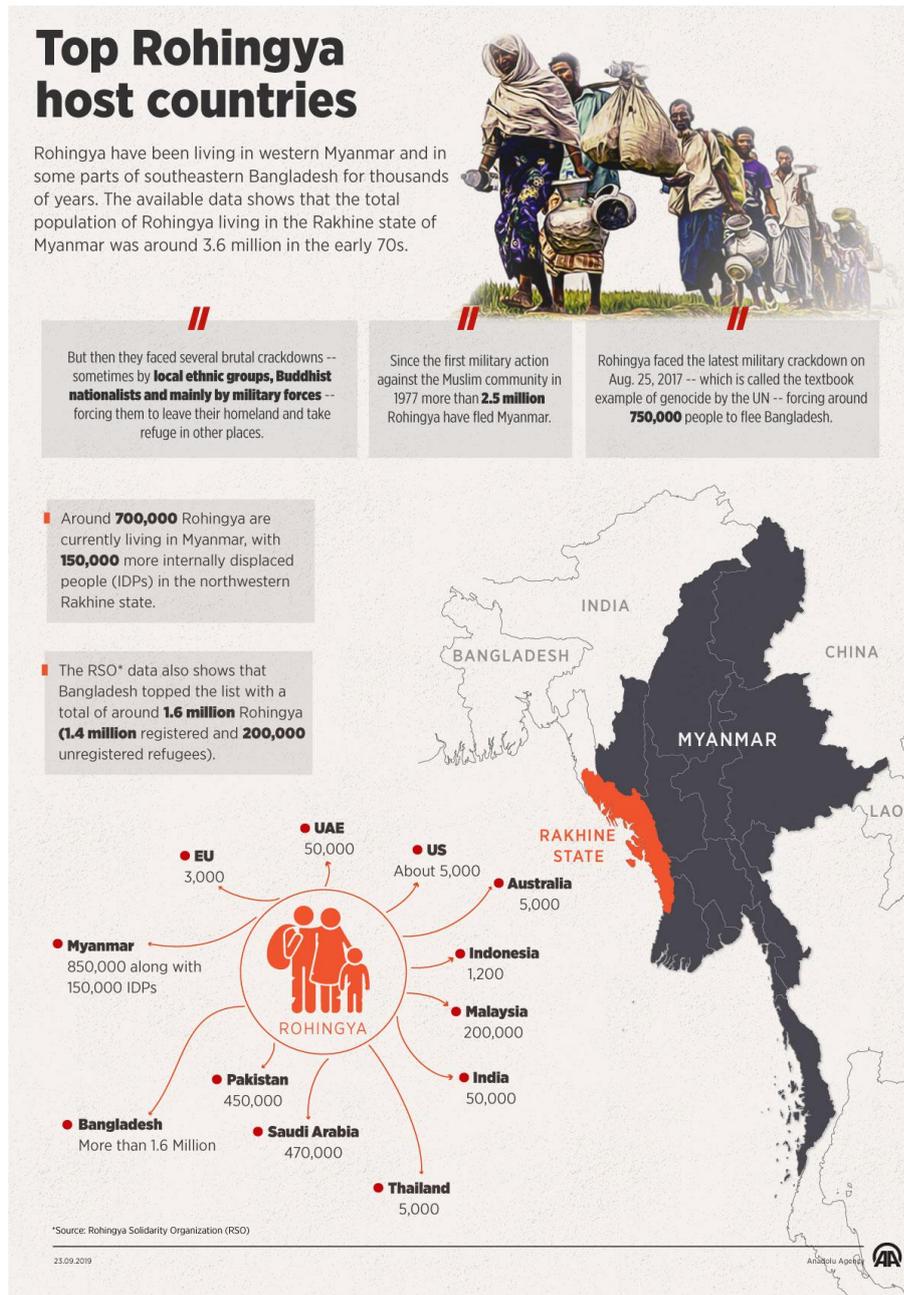
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Etnis Rohingya dapat disebut sebagai kelompok yang paling tidak beruntung di dunia. Ratusan ribu warga Rohingya harus meninggalkan Rakhine, Myanmar, ketika konflik terjadi akibat serangan dari kelompok Budha nasionalis dan juga militer Myanmar. Di tahun 2017, konflik bersenjata kembali terjadi antara kelompok militan Rohingya Arsa dengan militer Myanmar. Akibatnya, ratusan ribu warga etnis Rohingya banyak melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hingga saat ini, permasalahan yang dialami oleh warga etnis Rohingya belum menemukan titik terang dan mereka harus tetap menjadi pengungsi di negara lain.

Konflik yang terjadi di Myanmar tidak hanya berdampak pada warga etnis Rohingya saja, namun negara-negara di sekitar Myanmar pun turut terkena imbasnya. Salah satu negara yang paling terdampak akibat konflik Rohingya adalah negara Bangladesh. Pada konflik yang pecah pada 2017 lalu, lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan (Human Rights Watch, 2019a). Menurut UNOCHA (2019), konflik yang terjadi pada tahun 2017 lalu merupakan gelombang perpindahan terbesar dan tercepat yang dilakukan oleh warga Rohingya ke Bangladesh di mana sekitar 745.000 orang, termasuk 400.000 anak-anak, melarikan diri menuju Cox's Bazar. Para pengungsi Rohingya ini oleh Bangladesh ditampung di beberapa kamp pengungsian yang terletak di Kota Cox's Bazar, yang kemudian disebut sebagai kamp pengungsian terbesar di dunia (UNOCHA, 2019).

Gambar 1. Persebaran Pengungsi Rohingya di Berbagai Negara



Sumber: Anadolu Agency (2019)

Kondisi dilematis dialami oleh Bangladesh, di mana sebenarnya Bangladesh bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi seperti Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi ataupun Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa

Kewarganegaraan (UNHCR, 2018b). Namun, Pemerintah Bangladesh cukup terbuka dengan menerapkan *open-door policy* bagi pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh. Sejak pertama kali pengungsi Rohingya masuk ke Bangladesh dalam jumlah yang besar tepatnya di Cox's Bazar pada tahun 1978, Pemerintah Bangladesh sangat terbuka untuk menerima kehadiran para pengungsi tersebut (Gunawan, 2020). Saat itu, sekitar 250.000 orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar dan Pemerintah Bangladesh pun menyediakan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan juga tenda bagi pengungsi Rohingya. Pemerintah Bangladesh dengan terbuka menyambut kedatangan pengungsi Rohingya atas dasar solidaritas sesama Muslim dan empati atas ketidakberuntungan yang menimpa kelompok etnis Rohingya (Imran & Mian, 2014).

Meskipun Pemerintah Bangladesh sejak tahun 1970-an memiliki sikap terbuka dalam menerima pengungsi Rohingya, namun Pemerintah Bangladesh sering kali menerapkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan mengundang banyak kecaman mengenai perlakuan mereka terhadap pengungsi Rohingya. Misalnya kebijakan Pemerintah Bangladesh yang membatasi pengungsi Rohingya untuk menggunakan akses internet dan komunikasi online di kamp pengungsian (Washington Post, 2019).

Pemerintah Bangladesh juga melarang beberapa organisasi kemanusiaan non-pemerintah untuk beroperasi di kamp pengungsian. Misalnya Adventist Development and Relief Agency, sebuah organisasi kemanusiaan yang berasal dari Amerika Serikat, dilarang untuk beroperasi di kamp pengungsi Rohingya karena dituduh telah mendorong terjadinya protes penolakan repatriasi yang direncanakan Pemerintah Bangladesh (Washington Post, 2019). Bahkan, Pemerintah Bangladesh juga menanggukkan operasional 41 organisasi non-pemerintah yang ada di kamp pengungsian (The Daily Star, 2019).

Tidak berhenti pada penggunaan pendekatan yang keras terhadap pengungsi Rohingya, Pemerintah Bangladesh juga memutuskan untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh. Melalui Sekretaris Luar Negeri, Shahidul Haque, Pemerintah Bangladesh di forum Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Bangladesh tidak akan lagi mengakomodasi kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar (The Guardian, 2019). Kebijakan ini kemudian memantik kecaman dari organisasi-organisasi kemanusiaan. Menurut Human Rights Watch (2019), kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Bangladesh telah merusak tindakan-tindakan kemanusiaan yang baik bagi kepentingan pengungsi Rohingya selama ini.

Kebijakan penghentian penerimaan pengungsi inilah yang kemudian menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Menurut penulis, obyek penelitian ini menarik karena kita dapat melihat keterbukaan Pemerintah Bangladesh dalam menerima kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah mereka, tetapi kemudian di tahun 2019 Pemerintah Bangladesh menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya. Penelitian mengenai krisis pengungsi Rohingya telah cukup banyak dilakukan oleh akademisi Hubungan Internasional. Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan adalah mengenai respons organisasi internasional misalnya PBB ataupun ASEAN, dan juga dampak-dampak yang diterima oleh *host country* seperti dampak ekonomi ataupun keamanan.

Penulis telah mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah yang relevan dan terbaru untuk menemukan *state of the art* dari penelitian ini. Dalam penelitian yang berjudul “Rohingya Refugee Crisis and the State of Insecurity in Bangladesh”, Taufiq (Taufiq, 2019) menjelaskan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kehadiran pengungsi Rohingya di Bangladesh dalam sejumlah aspek seperti ekstremisme, perdagangan narkoba, lingkungan, dan kejahatan lainnya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Khuda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “The

Impacts and Challenges to Host Country Bangladesh due to Sheltering Rohingya Refugee”. Penelitian ini juga mencoba menjelaskan dampak dan tantangan yang dihadapi oleh Bangladesh dalam menampung pengungsi Rohingya. Di penelitian yang lain, Gunawan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “The Analysis of Non-Refoulement Principle Towards Rohingya Refugees in Bangladesh” menjelaskan mengenai sejauh mana implementasi prinsip *non-refoulement* yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1951 yang dilakukan oleh Bangladesh mengenai kebijakan penanganan krisis pengungsi Rohingya.

Berdasarkan penjelasan di latar belakang dan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis di dalam penelitian ini mencoba menjelaskan alasan Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya. Di saat kebanyakan penelitian lain berfokus pada alasan keamanan atau sekuritisasi, penelitian ini mencoba mengambil sudut pandang lain dengan melihat alasan Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya menggunakan teori *rational choice* atau pilihan rasional.

Dengan menggunakan teori pilihan rasional, penulis mencoba membantah argumen teori sekuritisasi yang menjelaskan tindakan Pemerintah Bangladesh merupakan sebuah upaya sekuritisasi dengan membangun persepsi bahwa pengungsi Rohingya adalah sebuah ancaman. Menurut penulis, tindakan Pemerintah Bangladesh dengan menghentikan penerimaan pengungsi tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu bentuk *insecurity*, melainkan memang Pemerintah Bangladesh melakukan suatu tindakan yang rasional berdasarkan kepentingan nasional karena Pemerintah Bangladesh telah mengalami kesulitan dalam menanggulangi pengungsi. Pemerintah Bangladesh telah menjadi *host country* bagi pengungsi Rohingya sejak 1970-an, sebuah rentang waktu yang tidak singkat untuk akhirnya Pemerintah Bangladesh mempersepsikan

pengungsi Rohingya sebagai *existential threat*. Di sinilah penulis mencoba mengisi celah yang belum dapat dijelaskan oleh teori sekuritisasi tentang mengapa setelah sejak 1970-an Pemerintah Bangladesh selalu menerima pengungsi Rohingya, di tahun 2019 lalu Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya?

1.3. Tujuan Penelitian

Pertama, memahami sejarah, kondisi pengungsi, dan kebijakan Bangladesh terkait dampak yang ditimbulkan pengungsi Rohingya. Kedua, mendeskripsikan proses dikeluarkannya kebijakan [penghentian pengungsi Rohingya sebagai pilihan yang rasional. Dan ketiga, menjelaskan alasan Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi Hubungan Internasional dengan menjadi referensi tambahan penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada isu-isu seputar krisis pengungsi ataupun *migration policy*. Digunakannya teori *rational choice* juga diharapkan dapat menambah referensi pembaca dalam memahami mengapa suatu kebijakan dibuat dengan menggunakan studi kasus penghentian penerimaan pengungsi Rohingya oleh Bangladesh.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pembaca dalam memahami dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke suatu negara, dan mengapa

negara harus memilih pilihan yang paling rasional dan menguntungkan dalam menangani krisis pengungsi.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Teori Pilihan Rasional

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional atau *rational choice* untuk menganalisis maksud, tujuan, ataupun pilihan dari dibuatnya suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan Pemerintah Bangladesh untuk menghentikan masuknya pengungsi Rohingya. Teori pilihan rasional biasanya diaplikasikan oleh akademisi Hubungan Internasional untuk memahami bagaimana pemimpin ataupun aktor pembuat kebijakan lainnya membuat keputusan, sehingga mereka dapat memprediksi tindakan yang akan dilakukan di lingkup hubungan internasional. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana dan mengapa aktor berperilaku seperti yang mereka lakukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pilihan rasional menurut Charles W. Kegley dan Shannon L. Blanton (2011), karena teori ini memiliki asumsi-asumsi yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kebijakan dibuat. Menurut Kegley dan Blanton (2011:196), *rational choice* adalah perilaku individu yang mengarah pada tujuan tertentu yang ditunjukkan ketika peristiwa internasional terjadi, dengan memanfaatkan informasi yang terbaik yang tersedia dan memilih respons terbaik yang dapat memaksimalkan keuntungan baginya.

Kegley dan Blanton (2011:196) menjelaskan beberapa rangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses pembuatan keputusan. Yang pertama, *problem recognition and definition*. Perlunya pembuatan keputusan dimulai ketika aktor pembuat kebijakan melihat adanya suatu permasalahan yang terjadi dan mendefinisikan secara obyektif karakteristik pembeda. Objektivitas ini membutuhkan informasi lengkap tentang tindakan, motivasi, dan kapabilitas aktor lain serta karakter

lingkungan global dan tren di dalamnya (Kegley & Blanton, 2011, hlm. 196). Pencarian informasi perlu dilakukan secara lengkap, dan semua fakta-fakta yang relevan harus dikumpulkan.

Yang kedua, *goal selection*. Setelah melakukan identifikasi permasalahan, pembuat kebijakan harus menentukan tujuan-tujuan apa sajakah yang menjadi kepentingan utama dari negara, berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Tahapan ini bisa disebut sebagai tahapan terpenting karena dengan dirumuskannya tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai, tujuan ini sekaligus menjadi *guidance* bagi negara untuk menentukan kebijakan apakah yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196), tahapan ini sering kali sulit dilakukan karena aktor harus melakukan identifikasi dan pembuatan hierarki tujuan dari berbagai aspek yang diprioritaskan. Pembuat kebijakan harus dengan cermat dan penuh perhitungan dalam menentukan manakah tujuan yang paling menguntungkan dan realistis untuk dicapai oleh negara.

Kemudian yang ketiga adalah *identification of alternatives*. Setelah tujuan utama telah ditentukan, pembuat kebijakan kemudian menyusun solusi-solusi yang dapat mengantarkan pada tercapainya tujuan dalam bentuk kebijakan. Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan dan kepentingan nasional, perlu disusun sejumlah alternatif kebijakan yang telah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya. Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196), Pilihan Rasional juga membutuhkan alternatif kebijakan-kebijakan yang bisa diupayakan untuk tercapai sebelum masuk ke pilihan terakhir. Alternatif kebijakan dalam hal ini diartikan sebagai pilihan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi ataupun menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga kepentingan nasional suatu negara juga dapat tercapai dengan baik.

Yang terakhir adalah *choice*. Setelah tujuan utama telah ditentukan dan kebijakan-kebijakan alternatif telah disusun, langkah terakhir adalah menentukan pilihan kebijakan manakah yang akan diterapkan. Pilihan ini harus melalui seleksi yang ketat di antara pilihan yang lain, dan melalui analisis untung rugi untuk memprediksi akurasi keberhasilan dari opsi yang dipilih. Kebijakan yang dipilih ini diharapkan dapat mendorong tercapainya kepentingan nasional dengan keuntungan yang paling maksimal dan kerugian yang paling minimal.

Setelah semua tahapan pembuatan kebijakan telah dilalui, maka akan terpilihlah sebuah kebijakan yang dianggap dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh negara, sekaligus dapat menjadi jalan bagi tercapainya kepentingan nasional yang juga telah disusun sebelumnya. Kebijakan ini haruslah memiliki probabilitas yang paling mudah tercapai, dan juga tentunya yang paling menguntungkan dan paling minimal resikonya. Patokan utama dari dipilihnya kebijakan ini adalah kepentingan nasional, maka dalam kerangka pemikiran ini penulis perlu menjelaskan mengenai konsep kepentingan nasional yang menjadi tujuan utama dari sebuah kebijakan.

1.5.2. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum digunakan oleh akademisi Hubungan Internasional untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini sering kali digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara di lingkup hubungan internasional. Kegley dan Blanton (2011, hlm. 32) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “*the goals that states pursue to maximize what they perceived to be selfishly best for their country*”. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang berusaha dicapai oleh negara untuk memudahkan mereka dalam mencapai apa yang dianggap menjadi yang terbaik bagi mereka.

Sementara itu, K.J. Holsti dalam bukunya yang berjudul “International Politics: A Framework for Analysis”, menggambarkan kepentingan nasional sebagai sekumpulan kondisi dan tujuan kolektif yang diserahkan pemerintah kepada individu pembuat kebijakan, untuk menguatkan pengaruhnya di luar dan juga untuk mengubah atau melanjutkan perilaku dari negara lain (Holsti, 1995, hlm. 123). Secara sederhana, yang dimaksudkan Holsti tentang kepentingan nasional adalah tujuan yang ditentukan pemerintah yang ditujukan untuk membuat kondisi negara menjadi lebih baik.

Senada dengan Kegley dan Blanton, Holsti (1995, hlm. 123) juga melihat bahwa kepentingan nasional cukup sulit untuk disebut sebagai kepentingan yang obyektif, dalam artian mewakili kesejahteraan seluruh warga negara. Holsti lebih melihat bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan dari individu atau kelompok tertentu yang dipromosikan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sejumlah warga negara tertentu, atau kepentingan privat yang diterjemahkan menjadi kebijakan publik (Holsti, 1995, hlm. 123). Jadi sebenarnya yang dimaksud kepentingan nasional bukanlah tujuan yang diharapkan dapat menjadi jalan kesejahteraan seluruh warga negara, melainkan hanya tujuan sekelompok individu tertentu yang di atasnamakan negara yang diharapkan dapat menyejahterakan kelompok tersebut. Di sisi yang lain, Holsti juga melihat bahwa kepentingan nasional yang telah berlangsung selama ini lebih banyak hanya merupakan respons jangka pendek dari suatu kondisi atau keadaan, bukan merupakan respons yang terpikirkan untuk dicapai secara berkelanjutan atau jangka panjang (Holsti, 1995, hlm. 125).

Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 202), pada dasarnya kepentingan nasional merupakan motivasi individu ataupun kepentingan kelompok yang akhirnya membentuk tujuan-tujuan yang di atasnamakan kepentingan nasional. Dalam hubungannya dengan teori pilihan rasional yang telah dijelaskan sebelumnya, posisi kepentingan nasional sangatlah

penting di mana kepentingan nasional menjadi dasar diterapkannya suatu kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu atas nama negara. Kegley dan Blanton (2011, hlm. 202) menjelaskan bahwa kepentingan nasional harus dicapai dengan cara yang rasional dengan penuh memperhatikan keuntungan dan kerugian, serta realistis untuk dicapai. Untuk itu, diperlukan pembuat kebijakan dengan kemampuan yang cermat dan penuh perhitungan agar tujuan yang ingin dicapai tidak meleset, meskipun pada kenyataannya kebijakan yang diterapkan tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi.

Digunakannya teori pilihan rasional dan konsep kepentingan nasional menurut Kegley dan Blanton ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menjelaskan alasan mengapa Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya di tahun 2019 lalu. Melalui penggunaan kerangka pemikiran tersebut, pada penelitian ini penulis berupaya menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bangladesh untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya merupakan hasil dari pertimbangan yang rasional dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan, dan juga menjadikan kepentingan nasional Bangladesh sebagai acuan utama dibuatnya kebijakan tersebut.

1.6. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis telah merumuskan hipotesis yaitu bahwa alasan Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya karena Pemerintah Bangladesh menganggap opsi penghentian ini merupakan opsi yang paling rasional yang didasari oleh kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Bangladesh. Opsi ini dipilih setelah melewati berbagai tahapan seperti *problem recognition and definition, selection goals, identification of*

alternatives, dan akhirnya dipilihlah opsi penghentian penerimaan pengungsi Rohingya ini sebagai *choice*.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1.7.1.1. Pengungsi

Dalam penelitian ini penulis perlu mendefinisikan konsep pengungsi agar tidak bias dengan konsep lain seperti *internally displaced person* (IDP) atau *asylum-seekers*. Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi atau *refugees* didefinisikan sebagai “*someone who is unable or unwilling to return to their country of origin owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion*”.

1.7.1.2. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah suatu kepentingan ataupun motivasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan utama melalui penerapan kebijakan-kebijakan tertentu. Kegley dan Blanton (2011, hlm. 32) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “*the goals that states pursue to maximize what they perceived to be selfishly best for their country*”. Kepentingan nasional ini disusun oleh aktor pembuat kebijakan berdasarkan persepsi bahwa tujuan tersebut adalah pilihan terbaik bagi negara.

1.7.1.3. Problem Recognition and Definition

Problem recognition and definition adalah tahapan pertama dari terciptanya sebuah kebijakan yang rasional menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196). Pada tahap ini, pembuat kebijakan harus melakukan identifikasi dan pendefinisian suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara. Identifikasi dan pendefinisian ini diperlukan untuk

menguraikan karakteristik dari permasalahan yang dihadapi, sehingga pembuat kebijakan dapat menyusun solusi-solusi sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

1.7.1.4. Goal Selection

Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196), *goal selection* adalah tahapan yang perlu dilewati oleh pembuat kebijakan untuk menentukan tujuan-tujuan apakah yang perlu dicapai oleh negara. Tujuan ini berkaitan dengan kepentingan nasional yang dimiliki suatu negara, sehingga perlu dilakukan penyusunan prioritas tujuan manakah yang paling mungkin dicapai oleh negara.

1.7.1.5. Identification of Alternatives

Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196), sebuah kebijakan yang rasional juga membutuhkan alternatif kebijakan-kebijakan yang bisa diupayakan untuk tercapai sebelum masuk ke pilihan terakhir. Alternatif kebijakan ini perlu melalui perhitungan mengenai keuntungan dan kerugian yang bisa diterima negara ketika mengadopsi kebijakan tersebut. Sehingga melalui adanya alternatif ini, negara dapat benar-benar memilih sebuah kebijakan yang paling menguntungkan dengan risiko seminimal mungkin.

1.7.1.6. Choice

Setelah menyusun alternatif kebijakan, *policy makers* harus menentukan satu kebijakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut Kegley dan Blanton (2011, hlm. 196), untuk dapat memilih satu kebijakan ini, diperlukan analisis yang cermat untuk mendapatkan pilihan yang paling akurat di antara pilihan yang ada dengan mempertimbangkan *cost* dan *benefit* yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

1.7.2. Definisi Operasional

1.7.2.1. Pengungsi

Sesuai dengan konteks penelitian ini, yang disebut dengan pengungsi adalah kelompok etnis Rohingya yang terpaksa melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di Myanmar. Berdasarkan definisi *refugees* yang dijelaskan oleh UNHCR, kelompok etnis Rohingya telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai pengungsi.

1.7.2.2. Kepentingan Nasional

Di dalam penelitian ini, kepentingan nasional yang dimaksud adalah kepentingan Pemerintah Bangladesh untuk mencapai tujuan utamanya dalam sejumlah aspek yang ditujukan bagi kebaikan masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, Pemerintah Bangladesh memiliki kepentingan nasional untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional yang cukup terhambat karena Pemerintah Bangladesh harus mengakomodir kebutuhan ekonomi dari ratusan ribu pengungsi Rohingya seperti dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

1.7.2.3. Problem Recognition and Definition

Pada tahapan *problem recognition and definition*, Pemerintah Bangladesh melihat adanya suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya dimulai dengan dikumpulkannya informasi dan bukti-bukti yang relevan. Permasalahan ini timbul dari berbagai macam bentuk seperti overpopulasi, tingkat kejahatan meningkat, stabilitas ekonomi terganggu, dan sebagainya. Sehingga Pemerintah Bangladesh perlu mengidentifikasi permasalahan manakah yang paling mendesak untuk diselesaikan agar kepentingan nasional Bangladesh tidak terganggu.

1.7.2.4. Goal Selection

Pada tahapan *goal selection*, Pemerintah Bangladesh menyusun tujuan-tujuan apakah yang perlu dicapai terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya. Pemerintah Bangladesh memiliki sejumlah tujuan yang dapat dicapai seperti stabilitas keamanan, peningkatan perekonomian nasional, ataupun tujuan lainnya. Untuk itu, dalam tahap ini perlu ditentukan manakah tujuan yang paling mungkin untuk dicapai oleh Pemerintah Bangladesh dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan pengungsi Rohingya.

1.7.2.5. Identification of Alternatives

Dalam konteks penelitian ini, beberapa alternatif kebijakan yang dapat diupayakan oleh Pemerintah Bangladesh berupa repatriasi (pengembalian) pengungsi Rohingya ke Myanmar melalui bantuan pihak ketiga seperti PBB untuk mendorong Myanmar agar bersedia memberikan jaminan keamanan bagi pengungsi Rohingya, ataupun upaya Bangladesh untuk mengirim pengungsi Rohingya ke suatu pulau khusus yang kemudian ditentang banyak aktivis kemanusiaan karena risiko yang terlalu besar yang mungkin dihadapi oleh para pengungsi di pulau tersebut.

1.7.2.6. Choice

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep *choice* adalah Pemerintah Bangladesh memilih opsi untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya karena Pemerintah Bangladesh telah memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan ini di antara kebijakan alternatif lainnya. Sehingga pilihan untuk menghentikan penerimaan pengungsi ini menjadi pilihan yang paling rasional bagi Pemerintah Bangladesh dengan mengacu pada tujuan dan kepentingan nasional Bangladesh sendiri.

1.7.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti, serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2013). Melalui penelitian eksplanatif, penulis di dalam penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antar variabel seperti Pilihan Rasional Pemerintah Bangladesh dengan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan jangkauan waktu penelitian mulai dari tahun 2017 di mana konflik Rohingya kembali terjadi dan gelombang besar pengungsi masuk ke Bangladesh, hingga tahun 2019 ketika Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*) dan juga berbasis internet (*internet-based research*). Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan. Misalnya data diperoleh dari buku, laporan, ataupun karya-karya ilmiah, serta artikel-artikel yang ditemukan di internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan, dengan cara mengorganisasikan data dan memilih data manakah yang penting dan perlu dipelajari, dan

kemudian menyusun kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca (Sugiyono, 2013). Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

1.7.7. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan hipotesis, serta metode penelitian yang meliputi definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang pemaparan identifikasi masalah yang meliputi penjelasan konflik Rohingya, proses masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh, kemudian posisi Bangladesh sebagai *host country*, dan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pengungsi lainnya. Bab 3 adalah bab pembahasan atau analisis penelitian. Di dalam bab ini, penulis menjelaskan proses pembuatan kebijakan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi Pemerintah Bangladesh mengeluarkan kebijakan penghentian penerimaan pengungsi Rohingya, serta menganalisis tindakan Pemerintah Bangladesh tersebut menggunakan teori pilihan rasional. Dan Bab 4 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diajukan oleh penulis.